

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan sebuah program yang selalu dilakukan oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Pembangunan itu sendiri diartikan sebagai upaya-upaya yang diarahkan untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik (Siahaan, 2004). Klasifikasi atau penggolongan suatu negara sebagai negara maju atau negara berkembang dapat dilihat dari pembangunan yang telah dilakukan oleh negara tersebut. Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang dan merupakan negara agraris masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber perekonomian. Oleh karena itu, Indonesia selalu mengupayakan pembangunan pertanian.

Iqbal dan Sudaryanto (2008) menyatakan bahwa pembangunan pertanian merupakan sebuah proses perubahan sosial. Peran dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam hal usaha pencapaian pembangunan pertanian seperti peran petani, pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam dunia pertanian dan lain-lain. Salah satu lembaga yang memiliki peran sangat besar dalam pembangunan pertanian adalah lembaga penyuluhan pertanian. Lembaga tersebut memiliki sebutan yang berbeda di setiap tingkat daerah. Pusat Pengembangan dan Penyuluhan (Pusbangluh)

merupakan lembaga penyuluhan pertanian yang berada pada tingkat pusat, pada tingkat provinsi terdapat Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh), pada tingkat kabupaten atau kota terdapat Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) dan pada tingkat kecamatan terdapat Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K).

Penyuluhan pertanian memiliki peran yang penting, karena penyuluhan pertanian merupakan bagian integral pembangunan pertanian yang mengupayakan pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lain untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kesejahteraan mereka. Van den Ban dan Hawkins (1999) menyatakan bahwa peran utama penyuluhan pada masa lalu dipandang sebagai alih teknologi dari peneliti ke petani. Penyuluh memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan serta kemajuan pertanian. Peran lembaga penyuluhan beserta penyuluh yang penting, sangat disadari oleh pemerintah sebagai agen perubahan dalam pembangunan pertanian. Sebagai agen perubahan, lembaga penyuluhan serta penyuluh pertanian pada setiap tingkat daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang handal, terutama pada tingkat kecamatan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K).

Terdapat dua bentuk BP3K untuk saat ini, yaitu BP3K model CoE (*Center of Excellence*) dan BP3K biasa. BP3K model CoE merupakan bentuk BP3K yang dijadikan sebagai percontohan kelembagaan penyuluhan yang ideal.

Pemerintah Provinsi Lampung menyadari pentingnya mengembangkan BP3K model CoE. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung dalam Program

Revitalisasi Pertanian menuju Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan mencanangkan BP3K model CoE.

BP3K model CoE dapat diartikan bahwa BP3K merupakan pusat kecermelangan di kawasan perdesaan, selain sebagai pusat informasi pembangunan pertanian juga menjadi pintu masuk program pembangunan dari semua pihak terkait (Laporan Program RPKK, 2012). Program CoE dimulai sejak 2010, dengan tujuh BP3K sebagai calon model CoE. Pada 2011, dari tujuh BP3K calon model CoE ditetapkan enam BP3K sebagai model CoE. Keenam BP3K model CoE tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar BP3K model CoE

| No. | Nama BP3K | Kabupaten/Kota |
|-----------|---------------------------|------------------|
| 1. | BP3K Terbanggi Besar | Lampung Tengah |
| 2. | BP3K Menggala | Lampung Selatan |
| 3. | BP3K Metro Barat | Kota Metro |
| 4. | BP3K Batang Hari | Lampung Timur |
| 5. | BP3K Padang Cermin | Pesawaran |
| 6. | BP3K Talang Padang | Tanggamus |

Sumber: Laporan Program RPPK Pengembangan BP3K sebagai CoE, 2012

Tabel 1 menunjukkan terdapat enam BP3K yang ditetapkan sebagai model CoE, salah satunya adalah BP3K Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Pertimbangan peneliti untuk memilih BP3K Kecamatan Talang Padang sebagai lokasi penelitian adalah berdasarkan hasil skoring terhadap BP3K calon CoE.

Hasil skoring tersebut menunjukkan bahwa BP3K Kecamatan Talang Padang memperoleh skor tertinggi kedua dengan total skor sebesar 180, setelah BP3K Terbanggi Besar dan Batang Hari dengan total skor yang sama yaitu 181 (Terlampir pada Tabel 57).

Sebagai BP3K percontohan, BP3K model CoE dinilai berdasarkan beberapa kriteria, salah satunya adalah penerapan program *cyber extension*. *Cyber extension* merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka menggerakkan program pengembangan penyuluhan pertanian. Kementerian Pertanian sebagai pengagas program *cyber extension*, mengartikan *cyber extension* sebagai sebuah upaya untuk menggunakan kekuatan jaringan *online*, komunikasi komputer dan multimedia interaktif digital untuk memfasilitasi penyebaran teknologi pertanian (Departemen Pertanian, 2010). Menurut UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, kegiatan penyuluhan merupakan tugas penyuluh pertanian baik yang berstatus sebagai PNS, swasta, maupun swadaya, dengan demikian *cyber extension* merupakan tugas penyuluh pertanian, dalam pengertian penyuluh harus mampu mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi (teknologi) melalui media *on-line* untuk dimanfaatkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha.

Selama hampir empat tahun, sejak dicanangkannya program ini pada 2010, program *cyber extension* masih belum dimanfaatkan dengan baik. Ditemukan berbagai hambatan bagi program *cyber extension* untuk dimanfaatkan dengan lebih baik, yaitu hambatan dalam mengaksesnya secara *on-line* karena jaringan internet yang tidak tersedia ketika berada pada daerah atau pekon tertentu,

hambatan karena masih minimnya pengetahuan penyuluh maupun petani dalam menjalankan sistem pengoperasian komputer dan pemanfaatan internet, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk memanfaatkan program tersebut, serta beberapa hambatan lainnya yang membuat pelaksanaan program *cyber extension* mengalami keterlambatan. Hambatan-hambatan tersebut juga dialami oleh BP3K Kecamatan Talang Padang. Upaya Kementerian Pertanian dalam melakukan percepatan program *cyber extension* telah dilakukan, namun diperlukan analisis mengenai kesiapan terhadap implementasi program tersebut agar percepatan berhasil. Oleh karena itu, penelitian ini terfokus pada analisis kesiapan serta strategi pengembangan yang diperlukan untuk mengimplementasikan program *cyber extension*.

B. Perumusan Masalah

Penyuluhan pertanian merupakan ujung tombak dalam pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian akan tercapai apabila didukung dengan kegiatan penyuluhan pertanian yang berjalan dengan baik. Penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan baik apabila lembaga penyuluhan serta penyuluh pertanian memiliki kemampuan yang handal, oleh karena itu Kementerian Pertanian dalam upaya meningkatkan kemampuan penyuluh mengagas program *cyber extension*. Program ini berlaku untuk lembaga penyuluhan pada setiap tingkat daerah, tanpa terkecuali di tingkat kecamatan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BP3K).

Program *cyber extension* merupakan sarana untuk mempermudah tugas penyuluh dalam penyediaan informasi bagi masyarakat pertanian secara *on-line*. Program ini telah diupayakan oleh Kementerian Pertanian untuk dipercepat implementasinya, akan tetapi percepatan ini memerlukan kesiapan bagi beberapa pihak sampai benar-benar dapat diimplementasikan, dengan harapan program *cyber extension* yang seharusnya membantu tugas penyuluh tidak menjadi kendala atau masalah baru bagi penyuluh dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, BP3K Kecamatan Talang Padang perlu dianalisis kesiapannya dalam implementasi program *cyber extension*, karena BP3K Kecamatan Talang Padang termasuk BP3K yang mengimplementasikan program *cyber extension*. Kondisi siap atau tidak siapnya BP3K Kecamatan Talang Padang memerlukan strategi pengembangan yang tepat untuk pengimplementasian program *cyber extension*.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini diajukan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesiapan BP3K Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dalam implementasi program *cyber extension*?
2. Bagaimana implementasi program *cyber extension* di BP3K Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus?
3. Bagaimana strategi pengembangan program *cyber extension* dalam pengimplementasiannya di BP3K Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kesiapan BP3K Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dalam implementasi program *cyber extension*.
2. Menetapkan implementasi program *cyber extension* di BP3K Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
3. Merumuskan strategi pengembangan program *cyber extension* dalam pengimplementasiannya di BP3K Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah dan Penyuluh

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memenuhi sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan penyuluh dalam mengemban tugasnya, serta mengawasi pelaksanaan tugasnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memotivasi para penyuluh untuk meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan multimedia (TIM).

2. Bagi Masyarakat

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat khususnya petani dapat merasakan hasil pelaksanaan tugas para penyuluh, serta memotivasi para petani untuk berpartisipasi dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan

tugas para penyuluh, terutama dalam implementasi program *cyber extension*.

3. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain di kemudian hari yang akan mengangkat topik penelitian yang sama.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai program *cyber extension* bagi mahasiswa/i